



Oleh: Sri Roviana

Gender, Perempuan dan Dilema Multikulturalisme

Tulisan ini hendak mengelaborasi persoalan-persoalan ketidakadilan gender yang terjadi di tengah masyarakat kita terhadap kaum perempuan, apa yang menjadi penyebab dan bagaimana masyarakat secara umum memandang perempuan bekerja dalam banyak level. Termasuk dalam pekerjaan yang sering dipandang "nista" sekalipun, dimanakah sebenarnya posisi perempuan berada dan bagaimana seharusnya perempuan diposisikan sehingga ketidakadilan gender bisa berakhir.

Untuk mengulas masalah tersebut, saya akan memulai tulisan ini dengan kisah-kisah nyata yang saya sering dengar dan temukan di tengah masyarakat yang dominan berkultur laki-laki (male culture) serta berkultur religious (religious culture). Berdasarkan kisah yang disajikan saya berharap dapat memberikan apresiasi, perhatian dan sekaligus berupaya untuk turut ambil peran dalam pengurangan ketidakadilan gender di tengah masyarakat kita.

Tulisan ini karena itu memiliki tujuan sederhana saja, mengungkapkan sisi-sisi gelap kaum perempuan yang berada dalam budaya dominan patriakhal dan patrimonial. Dari sana diharapkan kaum lelaki khususnya dan perempuan pada umumnya, serta masyarakat dapat membedakan mana yang dinamakan ketidakadilan gender dan ketidakadilan pada perempuan Indonesia.



Kisah-Kisah Sedih Perempuan

Kisah pertama

Satu ketika, tahun 2008, saya melakukan observasi di kawasan wisata pantai Parangkusumo Yogyakarta bersama beberapa mahasiswa untuk melihat keadaan lapangan di Parangkusumo. Sampai di Parangkusumo kira-kira jam 10.30 WIB. Saya menyebar bersama kawan-kawan lainnya untuk mencari informasi sekaligus melakukan wawancara dengan informan.

Sebelumnya saya berkeliling di kawasan pantai Parangkusumo, sambil mencari orang yang tepat untuk dijadikan informan, tepat pukul 11 sambil duduk-duduk di arena wisata, saya menemukan seorang tua bermumur kira-kira 60 tahun. Nenek tua itu berjualan sederhana dengan penampi yang tampak sudah tua usia pembuatannya.

Sambil duduk disebelah nenek tua tersebut saya membeli kacang rebus dan segelas minuman (aqua) gelas yang dijajakan si nenek tersebut. Sambil menikmati kacang rebus dan aqua, saya ngobrol ngalor ngidul tentang Parangkusumo, penjual, para wisatawan dan hasil jualan. Serba santai saya lakukan sehingga tidak tampak jika saya sedang melakukan wawancara tentang apa yang dilakukan nenek dan segala hal terkait Parangkusumo.

Pertanyaan saya mulai dari mana asalnya nenek. Dia bilang jauh dari Parangkusumo, harus berangkat jam tiga pagi sehingga tiba di sekitar pantai jam 8.30 atau jam 09.00 WIB. Perjalanan menelan ongkos Rp.30.000 satu kali jualan, untuk naik ojek dan naik bis berangkat pulang kembali ke rumah. Saya kemudian menanyakan setiap kali jualan bisa mendapatkan uang berapa, nenek katakan tidak mesti kadang dapat Rp. 50.000, kadang Rp. 35.000 malahan kadang hanya Rp. 25.000, kalau pas ramai sekali bisa dapat Rp. Rp. 75.000-Rp. 100.000.

Pada hari apa saja yang mungkin dapat diatas Rp. 50.000, jika ada tontonan seperti dangdut, jatilan atau yang lainnya. Tetapi sekarang jarang sekali ada tontonan karena takut ada razia, sehingga sepi pengunjung. Oleh sebab itu, saya jualan karena sudah sejak muda jadi tidak untuk

tetap saya kerjakan. Untuk hiburan kata si nenek.

Ketika saya tanya, mengapa takut razia, kan ini pantai pariwisata? Jawabnya ringkas dan sederhana, ada bapak-bapak yang suka menangkap perempuan-perempuan yang katanya PSK (Pekerja Seks Komersial). PSK itu apa yang saya tidak tahu, karena saya tidak sekolah. Tapi pernah saya lihat beberapa perempuan dikejar-kejar bapak-bapak berpakaian hitam-hitam katanya sedang mengejar PSK. Sejak itu memang Parangkusumo sepi sekali pengunjung (wisata). Malam jumat dan Selasa Kliwon yang dulunya ramai sekali sekarang juga sepi, pada takut padahal seringkali mereka itu mau ziarah dan semedi di sisi di dekat batu itu (sambil menunjuk seonggok batu di tengah lokasi) wisata.

Jadi perempuan ini sulit mas katanya. Mau bekerja untuk meringankan beban ekonomi keluarga malah sering dianggap aneh-aneh. Kerjanya katanya tidak halal dan sebagainya. Tidak membantu ekonomi keluarga, katanya hanya ingin enak saja di rumah. Perempuan susah seperti saya ini banyak mas, bukan hanya di sini, dimana-mana ada banyak. Mestinya perempuan-perempuan seperti saya dan lainnya ini diberi tempat yang layak dan perlindungan dari pemerintah untuk bisa bekerja yang aman dan tidak dikejar-kejar aparat. Dengan alasan kebersihan saya juga pernah diusir dari lokasi Parangkusumo loh mas, padahal saya jualan sudah sejak tahun 1970-an sampai sekarang di sini.

Banyak orang tidak memperlakukan perempuan dengan baik, padahal mereka juga lahir dari perempuan. Banyak orang tidak melihat perempuan berjualan atau bekerja sebagai sesuatu yang bermanfaat dan baik, malah dituduh negatif, sebagai pelacur lah, tidak menjaga keluarga lah dan seterusnya jadinya perempuan banyak yang tetap dirumah sekalipun ekonominya kekurangan. Tolong mas ini disampaikan pada bapak-bapak di kota sana, tidak semua orang yang datang ke Parangkusumo itu pelacur dan mengotori pantai parangkusumo. Kami ini mencari nafkah untuk keluarga.

Kisah kedua

Suatu ketika saya mendapatkan kisah pasangan yang menikah dalam usia yang sebenarnya sama-sama sudah dewasa, lelaki berumur 31 tahun, sementara perempuan berumur 29 tahun. Pasangan ini berasal dari daerah yang berbeda, sekalipun sama-sama Jawa. Lelaki bekerja di sektor swasta (bukan Pegawai Negeri Sipil) sementara perempuan istrinya PNS.

Perkawinan berlangsung cukup meriah dan disaksikan keluarga pihak lelaki dan perempuan, termasuk saudara-saudaranya. Memang perkenalannya tidak terlalu lama, namun tampaknya saling mencintai sehingga berlanjut dalam meja pernikahan.

Dalam usia pernikahan yang tidak terlalu lama memiliki seorang anak. Disinilah mulai terjadi beberapa persoalan. Sebenarnya persoalan terkait soal kebiasaan sehari-hari, misalnya soal bangun pagi. Kerja domestik, seperti menanak nasi, menjerang air sampai memandikan anak. Pembagiannya tidak jelas, karena sama-sama tidak terbiasa bangun pagi dan mengerjakan pekerjaan domestik. Tetapi dari sana seakan-akan tidak ada jalan keluar pemecahannya sehingga semakin runcing menjadi permasalahan.

Suatu ketika saya mendapatkan cerita bahwa pernikahannya hampir pasti akan berakhir karena diantara mereka berdua tidak bisa lagi ada komunikasi dan kerjasama dalam kerja domestik maupun dalam masalah-masalah lainnya. Saya katakan sedih juga karena sudah mempunyai anak dan dahulu menikahnya juga tidak ada yang memaksakan, alias tampaknya suka sama suka.

Saya mendapatkan cerita katanya sumber masalahnya adalah soal pendapatan karena lakinya tidak jelas pendapatannya, sementara istrinya pendapatannya jelas dan lebih banyak. Saya katakan, saya juga mungkin lebih sedikit dari istri saya pendapatannya, tetapi gak apa-apa kok. Katanya karena istri saya mau memahami kondisi suaminya sementara istrinya tidak mau menerima kondisi objektif suaminya. Soal pekerjaan domestik juga kami lakukan bersama-sama, malahan seringkali saya melakukan karena istriku pulang sering sampai sore dan jelas lebih lelah ketimbang saya.

Saya terus terang kaget sekali dengan

penjelasannya, karena istrinya dikatakan tidak bersedia menerima kondisi suaminya, bukan hanya dalam hal pendapatan tetapi pekerjaan dan sebagainya. Istrinya dalam kondisi salah karena pemimpin keluarga adalah suami bukan istri, tetapi malah dalam keluarganya seakan-akan yang menjadi pemimpin adalah istrinya kata si suami karena ekonominya lebih mampu daripada dirinya, yang sebagai pegawai swasta. Kemudian suatu saat saya mendapatkan cerita yang sebaliknya dari orang yang dekat dengan istrinya, bahwa soal pendapatan tidak pernah menjadi masalah karena bagaimana pun kita itu satu keluarga bisa saling membantu untuk urusan keluarga, membeli bahan makanan pokok, menabung untuk anak dan biaya kesehatan dan transportasi.

Tetapi penjelasan dari teman istrinya tersebut seringkali tidak diterima oleh suami. Bahkan ketika berbicara soal menabung, membikin atau membeli rumah, dan makanan pokok sehari-hari suaminya kerap tersinggung. Pendek kata tidak ada kata sepakat dan istri dikatakan tidak bisa memahami suaminya. Keluarga akhirnya pun agak runyam sampai sekarang. Antara suami dan istri sering ketemu tetapi dialog tidak berjalan dengan baik. Saya dengar masih sering curiga diantara mereka sekalipun sudah beberapa kali ketemu. Perempuan istrinya merasa bersalah pada suaminya, tetapi suaminya tidak pernah merasa punya salah. Padahal saya pikir antara keduanya sama-sama memiliki kekurangan dan kesalahan yang bisa saling memaafkan dan memperbaiki diri sehingga keluarganya utuh kembali dan tidak ada saling membenci.

Perempuan istrinya sekarang harus memperhatikan kebaikan-kebaikan pada suaminya dan keluarga suami sekalipun suaminya tidak demikian. Anak-anaknya "dikurung" nyaris tidak boleh bersama-sama dengan istrinya kecuali ada suaminya. Keluarga istrinya pernah mendatanginya tetapi tidak mendapatka respons positif. Sementara keluarga suami jarang sekali mendatangi keluarga istrinya, bahkan suaminya pun tidak pernah silaturahmi kepada keluarga istrinya. Hubungannya sungguh sangat tidak menguntungkan pihak istrinya sampai saat ini. Perempuan istrinya merasa bersalah tetapi suaminya tidak bersedia memaafkan dan menunjukkan kesalahannya.

Kesetaraan gender

Dari dua kisah diatas ada beberapa hal yang dapat kita ambil pelajaran. Pertama soal keadilan gender dalam masyarakat kita yang masih dipahami sangat parsial dan tidak jelas sehingga keadilan gender itu identik dengan perlawanan perempuan pada laki-laki. Yang terjadi di masyarakat adalah ketidakadilan gender karena perempuan selalu menjadi "korban", entah olok-olok atau diskriminasi kebijakan baik publik maupun domestik. Terdapat ketidakadilan ekonomi dan politik terhadap perempuan selain ketidakadilan struktur sosial dalam masyarakat yang jelas-jelas memojokkan perempuan. Problem ini yang seringkali berhubungan dengan distribusi keadilan, baik distribusi kekuasaan, distribusi pekerjaan maupun distribusi ekonomi.

Kedua, pembagian kerja laki-laki perempuan. Karena ada pemahaman yang keras bahwa laki-laki adalah kepala rumah tangga maka apa saja yang dikerjakan lelaki adalah hal yang benar, bahkan menuduh istri selingkuh, main serong atau tidak mau memahami suami adalah hal yang harus dimaklumi oleh sang istri. Istri harus selalu memahami hal yang menjadi profesi suami sementara suami tidak harus memahami profesi sang istri.

Dalam soal pekerjaan suami seakan-akan tidak boleh lebih sedikit dari istri, sekalipun sebenarnya ada banyak dimasyarakat bahwa suami itu penghasilannya riilnya lebih sedikit dari istri, tetapi tidak seharusnya menjadi lahan persoalan. Apalagi suami merasa tersinggung ketika dibahas soal pekerjaan dalam keluarga karena untuk menata masa depan keluarga.

Ketiga, domestikasi perempuan. Dalam banyak kisah dan kasus di masyarakat, yang namanya pekerjaan seperti menanak nasi, menjerang air, memandikan anak, memberikan ganti pakaian anak dan mempersiapkan sarapan anak-anak adalah pekerjaan perempuan alias istri. Padahal pekerjaan domestik seperti itu tidak seharusnya hanya menjadi pekerjaan perempuan atau istri, tetapi juga sekaligus pekerjaan suami karena dalam satu rumah tangga.

Hal yang penting adalah komunikasi tentang

pembagian pekerjaan domestik karena seorang perempuan sesungguhnya pekerjaannya banyak yang berlipat ganda. Seorang perempuan yang bekerja di kantor, entah swasta atau negeri kemudian harus mengerjakan seluruh pekerjaan domestik jelas memberatkan seorang perempuan. Oleh sebab itu, sebenarnya yang harus dilakukan adalah bagaimana pekerjaan domestik dapat diselesaikan secara bersama-sama.

Tidak ada hinanya seorang suami (laki-laki) mengerjakan pekerjaan domestik menanak nasi atau menjerang air, bahkan mempersiapkan baju ganti anak-anak karena memang untuk kebutuhan keluarganya. Tidak ada hinanya pula seorang lelaki mencuci piring, membantu menyapu rumah, dikala seorang istri sedang mengerjakan yang lainnya. Pekerjaan domestik bukanlah pekerjaan perempuan sementara pekerjaan publik adalah pekerjaan laki-laki. Pekerjaan domestik merupakan pekerjaan yang harus dikerjakan secara bersama-sama karena memang seringkali membutuhkan waktu yang lama dan cenderung membosankan. Pekerjaan publik tidak berarti yang dapat mendatangkan uang, sementara pekerjaan domestik adalah yang rutinitas dan tidak menghasilkan uang.

Oleh sebab itu, keadilan gender adalah upaya menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang berimbang, tidak ada diskriminasi disana. Diskriminasi tidak boleh terjadi baik karena pekerjaan, pendapatan, pendidikan, atau pun jenis kelamin. Keadilan gender adalah sebuah upaya menempatkan manusia dimuka bumi untuk bisa saling bekerjasama, saling membantu dan saling terbuka karena itu membutuhkan dialog dan lapang dada diantara para pihak (laki-laki dan perempuan).

Diskriminasi bisa terjadi pada lelaki, tetapi banyak terjadi pada perempuan sehingga perjuangan keadilan gender seakan-akan perjuangan kaum perempuan atas kaum lelaki. Hal seperti ini harus segera ditinggalkan, karena keadilan gender bukan perjuangan kelamin (laki-laki dan perempuan) tetapi perjuangan melawan ketidakadilan yang menimpa siapa saja dalam

masyarakat sehingga menciptakan masyarakat yang beradab dan benar-benar manusiawi. Kesadaran akan keadilan adalah kesadaran untuk semua bukan hanya untuk laki-laki, atau hanya untuk perempuan.

Memperjuangkan keadilan karena itu juga harus bersama-sama tidak boleh hanya satu pihak. Antara laki-laki dan perempuan, antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil harus

saling bekerjasama membangun sebuah tatanan masyarakat yang adil gender. Ada banyak persoalan terkait ketidakadilan gender yang membuat masyarakat kita tidak maju, karena diantara satunya terdiskriminasi. Pendidikan adalah salah satunya. Banyak perempuan tidak terdidik sehingga buta huruf dan tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang mencukupi untuk kehidupan sehari-hari.

Pekerjaan Perempuan

Soal pekerjaan perempuan di masyarakat patriarki adalah soal yang serius harus dikemukakan. Hal ini harus diingat karena banyak pekerjaan perempuan yang dianggap tidak dapat menghasilkan dimensi ekonomi sekalipun sangat vital. Pekerjaan

mengasuh anak (mendidik) di dalam keluarga. Seringkali pekerjaan ini dianggap tidak menghasilkan uang karena itu seakan-akan lebih rendah ketimbang pekerjaan yang mendatangkan uang. Sebut saja bisnis atau menjadi birokrat untuk lelaki. Pekerjaan menjadi birokrat dan bisnis untuk lelaki seakan-akan lebih mulia ketimbang pekerjaan perempuan di rumah mengasuh anak.

Tentu saja tidak benar pembagian pekerjaan yang seperti itu. Namun dalam realitas sehari-hari tetap terjadi, sehingga distribusi pekerjaan seringkali dipahami bahwa pekerjaan domestik adalah pekerjaan perempuan sementara pekerjaan lelaki adalah pekerjaan publik. Pekerjaan domestik tidak menghasilkan keuangan keluarga sementara pekerjaan publik dianggap menghasilkan keuangan untuk keluarga. Distribusi pekerjaan semacam ini jelas distribusi pekerjaan yang tidak adil gender karenanya harus direvisi sehingga keadilan gender akan tumbuh di masyarakat yang memang *male perspective* dan *male culture*.

Beberapa pekerjaan yang memiliki dimensi *male perspective* seperti dikenal dalam masyarakat adalah menjadi politisi dan pejabat publik. Sementara pekerjaan perempuan adalah pekerjaan "rumahan seperti mencuci pakaian, merawat anak dan menyediakan makanan

foto: bintangkartika.files.wordpress.com



untuk keluarga. Posisi pekerjaan seperti itu, menempatkan pekerjaan publik dianggap lebih bergengsi sementara pekerjaan rumahan lebih rendah statusnya. Pekerjaan publik adalah pekerjaan lelaki sementara pekerjaan rumahan adalah pekerjaan perempuan.

Jika ada perempuan menjadi politisi, menjadi pejabat publik, karena yang berkembang adalah *male perspective* maka yang akan muncul di masyarakat adalah bahwa "lelakinya" banyak berkorban untuk perempuan, bahkan dengan banyak tuduhan lainnya, terutama bila perempuan yang bekerja dalam sektor publik pulang sampai larut malam. Masyarakat akan memberikan pelbagai macam label yang negatif atas perempuan. Sementara jika yang berada pada sektor publik adalah lelaki maka masyarakat akan memberikan label yang sangat positif, bertabrakan dengan label untuk perempuan. Misalnya label lelaki pekerja keras. Lelaki bertanggung jawab dan seterusnya. Sementara untuk perempuan lebelnya antara lain, kasihan keluarganya, anaknya dan suaminya sering ditinggal pergi sampai larut malam.

Sungguh sebuah ironi dan ketidakadilan yang nyata sekalipun dalam simbol, karena dengan ungkapan-ungkapan bukan dalam perbuatan aktual seperti memukul atau menganiaya perempuan. Perempuan diskriminasi dengan pekerjaan yang dilakukan karena banyak faktor menyebabkan hal itu harus terjadi. Oleh sebab itu, *male perspective* sebenarnya harus digeser menjadi *female perspective* sehingga apapun yang dikerjakan lelaki dan perempuan bisa dipandang sebagai sebuah distribusi pekerjaan yang proporsional dan tanggung jawab. Tanggung jawab personal sekaligus pertanggung jawaban publik sebab masyarakat kita masih mengidap apa yang dinamakan penyakit diskriminatif dan *prejudice* atas kelompok masyarakat lainnya. Ketidakadilan kembali terjadi sering karena masalah pekerjaan.

Dalam konteks masyarakat semacam itu maka hal yang krusial harus diperbaiki adalah bagaimana memberdayakan kaum perempuan dan kaum laki-laki untuk dapat memahami apa yang dinamakan keadilan gender. Baik laki-laki maupun perempuan merupakan agensi-agensis untuk melakukan perubahan dalam masyarakat secara proporsional. Pekerjaan memberdayakan masyarakat merupakan tanggung jawab lelaki dan

perempuan secara bersama-sama. Partisipasi lelaki dan perempuan dalam level publik, level domestik dan level *grass roots* merupakan tanggung jawab bersama sehingga dapat menciptakan apa yang dinamakan transisi pemerintahan (*governance*) dari *bad governance* menuju *good governance* yang ditandai dengan pembagian pekerjaan secara adil, tidak diskriminatif.

Pemberdayaan perempuan secara individual memang merupakan hal yang penting. Namun pemberdayaan perempuan secara kolektif merupakan hal yang jauh lebih penting karena kolektivitas akan membuat partisipasi publik akan semakin jelas terjadi. Sementara pada level individual akan mendukung pada sektor yang sifatnya domestik. Dengan menempatkan pemberdayaan secara kolektif dengan sendirinya nanti akan memengaruhi perubahan pada level individual karena terjadi persebaran yang relatif lebih cepat ketimbang hanya pada pemberdayaan individual. Hanya saja perlu sebuah kerangka aktivitas yang sesuai sehingga pemberdayaan kolektif untuk keadilan gender tidak menumbuhkan sikap antipasti dari kelompok yang sejak awal tidak menghendaki atau kurang setuju dengan perspektif pemberdayaan perempuan atau *female perspective* dalam masyarakat.

Jika upaya-upaya pemberdayaan perempuan secara kolektif gagal yang biasanya terjadi adalah kembalinya perempuan pada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya domestik dan dianggap sebagai kodrati. Padahal sama sekali tidak ada urusan dengan kodrati sebab soal pekerjaan merupakan usaha-usaha yang dapat diperoleh dengan usaha keras sehingga membutuhkan kompetisi. Dan harus dipahami kompetisi terbuka sebenarnya secara tidak langsung akan menempatkan perempuan dalam posisi tidak berdaya dibanding lelaki. Hal ini karena perspektif dan struktur sosial yang dibangun memang tidak memberikan ruang yang lebih memadai kepada kaum perempuan. Perempuan ditempatkan pada struktur sosial yang marginal sementara lelaki pada struktur sosial yang diuntungkan, oleh sebab itu kompetisi pada lapangan pekerjaan sebenarnya lebih direncanakan untuk mengalahkan kaum perempuan dan menguntungkan kaum lelaki.

Tidak banyak lapangan pekerjaan yang diperuntukkan untuk kaum perempuan dalam

sektor publik, kecuali dengan kompetisi sangat ketat. Misalnya untuk menjadi politisi atau pejabat publik. Benar bahwa belakangan ada beberapa perempuan menempati sektor publik, tetapi dapat dilihat demikian kecil persentasenya dibanding dengan jumlah penduduk Indonesia yang jauh lebih besar jumlah kaum perempuannya. Hal ini dapat dibaca karena persoalan keadilan gender dalam lapangan pekerjaan memang masih menyisakan pekerjaan rumah yang sangat krusial khususnya pada para pembuat kebijakan sehingga

keadilan gender dalam pekerjaan bisa terwujud. Pekerjaan apa pun bisa diakses untuk laki-laki dan perempuan secara adil bukan diskriminatif.

Perempuan dan laki-laki diberi kesempatan yang sama untuk dapat meraih posisi-posisi strategis dalam pekerjaan publik bukan karena koneksitas dengan keluarga, pejabat publik atau kekuatan modal yang dimiliki. Namun pekerjaan publik dapat diperoleh karena struktur sosial dan kebijakan yang dibuat memang memungkinkan untuk terjadinya kompetisi yang adil dan transparan untuk warga Negara.

>> Dilema Multikulturalisme

Ketika memasuki ruang yang dinamakan multikulturalisme, ada banyak persoalan yang menjadi penghalang disana. Persoalan tersebut antara lain soal kultur seperti apa yang hendak ditawarkan pada publik sehingga mampu menciptakan ruang (*space*) yang adil? Bukankah selama ini teah terbuka ruang dan sekaligus sarana untuk hadirnya sebuah keragaman budaya? Apakah istilah multikultur ini juga sesuai dengan kondisi masyarakat kita yang bukan masyarakat urban atau tujuan imigran?

Dengan kesulitan-kesulitan seperti itu, semakin jelas menandakan bahwa diskusi soal multikulturalisme masih menyisakan banyak agenda, apalagi jika hendak menghadirkan apa yang dinamakan kultur hybrid, sebuah kultur yang sebelumnya tidak terbayangkan sama sekali. Sebuah kultur yang merupakan perkawinan dari banyak kultur atau kultur yang lahir dari sebuah konstruksi-konstruksi sosial yang sebelumnya tidak dibayangkan namun terus mengalami perkembangan dimasyarakat. Disini istilah kultur representasi juga menjadi persoalan tersendiri.

Apakah kultur yang multikultur merupakan representasi dari belbagai kultur yang hadir di masyarakat, ataukah representasi dari kultur yang hendak menjadi jenis kultur baru, yang merupakan arena yang sebelumnya tertutup untuk sebuah pertarungan? Inilah kesulitan

lain untuk menterjemahkan multikulturalisme itu sendiri di tempat kita sekarang. Namun demikian bukan berarti bahwa multikulturalisme merupakan hal yang tidak perlu diperbincangkan. Bahkan karena banyaknya persoalan disana mengharuskan untuk semakin sering dibahas sehingga dapat ditemukan semacam kerangka bersama atau sekurang-kurangnya kerangka besar tentang multikulturalisme tersebut agar tidak kontraproduktif dalam sebuah arena sosial yang terus berkembang.

Pertanyaan tentang mengakomodasi -mengakomodir (inklusi) atau mengeluarkan (eksklusi) atas sebuah kultur menjadi persoalan yang sering dijadikan pijakan ketika membahas multikulturalisme sekaligus berhubungan dengan posisi kewargaan (*citizenship*) yang acap kali bermasalah. Apakah ada kultur yang *genuine* ataukah semua kultur itu merupakan percampuran dari pelbagai kultur merupakan persoalan lanjutan yang masih diperdebatkan.

Namun demikian, sebuah penjelasan yang mencoba menempatkan kultur kewargaan (*cultural citizenship*) sebagai sebuah upaya untuk memposisikan perhatian pada adanya ruang komunikasi dan pembangunan berbasis masyarakat dengan pelbagai aspeknya tampaknya bisa dijadikan penting ketika membahas multikulturalisme. Kata kunci yang paling

substansial adalah adanya kehendak bersama untuk menyadari bahwa pelbagai macam kultur yang ada dalam masyarakat tidak boleh menghalangi terjadinya perkembangan komunikasi antarwarga Negara, sehingga demokrasi menjadi ruang untuk tumbuhnya pengakuan atas keragaman budaya, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kompetisi yang adil dan sekaligus terjadinya pilihan-pilihan atas pelbagai macam identitas dalam masyarakat.

Jika semua itu dapat terjadi maka persoalan dilema-dilema multikulturalisme yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan akan mengalami pengurangan. Kemungkinan-kemungkinan bahwa masyarakat akan berdasarkan pada karakteristik kultur yang demokratis, *cultural citizenship* dan menghargai adanya pelbagai macam hak-hak hidup warga Negara menjadi basis untuk tumbuhnya demokrasi yang substansial, bukan sekedar demokrasi prosedural seperti sekarang terjadi.

Keragaman kultur dalam masyarakat harus dihadirkan dalam situasi dimana antara ruang sosial (*public and private sphere*) muncul secara bersama-sama. Tidak boleh diantara satunya mengeklusi yang lain, apalagi terjadi saling

konfrontasi antara kultur publik dan kultur privat. Tidak boleh terjadi memposisikan kultur publik dianggap lebih prospektif dan produktif sementara kultur privat marginal dan konsumptive. Diantara keduanya harus diapresiasi oleh Negara untuk menciptakan apa yang dinamakan keadilan gender yang berbasis pada masyarakat sipil untuk kemajuan *cultural citizenship*.

Benar bahwa antara arena publik dan domestik ada perbedaan, namun tidak berarti satu diantaranya lebih baik. Hal yang harus dikerjakan sejak sekarang adalah menempatkan arena publik dan domestik sebagai ruang yang harus dikomunikasikan secara transparan. Harus didukung secara organisasi sehingga terjadi pertemuan yang kondusif atas perbedaan-perbedaan, bukan kontra produktif yang menimbulkan kecurigaan-kecurigaan antar sesama warga Negara. Hubungan antara sumber daya sistemik (struktural kekuasaan) dengan sumber daya sosial kultural harus saling dimanfaatkan sehingga *civil society* yang bermartabat dan demokratis sungguh-sungguh dapat tercipta. Dan inilah ruang keadilan gender kemudian akan bertumbuh secara memadai.

Kesimpulan

Terkait dengan ketidakadilan gender hal yang menjadi penting untuk dilakukan adalah melakukan restrukturisasi atau perombakan tatanan kebijakan atau kekuasaan yang berhubungan dengan kebijakan yang mampu menciptakan distribusi keadilan pada masyarakat. Keadilan pada laki-laki dan perempuan yang selama ini termarginalkan, baik secara ekonomi, politik kekuasaan maupun secara struktur sosial. Jika hal ini tidak dilakukan maka ketidakadilan gender yang selama ini menjadi kabut tebal munculnya distribusi keadilan hanya akan berhenti dalam tataran wacana karena minimumnya praktek keadilan dalam masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

Ketidakadilan dapat berupa diskriminasi dalam pekerjaan, olok-olok atas profesi

pekerjaan, kebiasaan sehari-hari sampai dengan kebijakan yang tidak mendukung pada adanya keadilan distributif. Secara global, ketidakadilan gender dapat terjadi pula karena perempuan diposisikan sebagai "bawahan lelaki" sementara memiliki beban tanggung jawab yang lebih besar ketimbang lelaki dalam keluarga dan masyarakat. Misalnya soal mengasuh anak dan memperhatikan kehidupan keluarganya, termasuk mencari nafkah tambahan karena suaminya tidak mampu mencukupi kehidupan sehari-hari. Disinilah, perempuan seperti hidup diaspora diantara dua karang besar: kapitalisasi ekonomi dan kerja domestik yang sama-sama memberatkan kaum perempuan sehingga menumbuhkan ketidakadilan gender.

Situasi multikultur yang merupakan bagian terpenting dalam masyarakat ternyata meninggalkan banyak catatan pada kaum perempuan sekaligus lelaki. Sebab multikulturalisme yang hadir ditengah masyarakat seringkali dipahami sebagai kehidupan yang belum sewajarnya. Menghadirkan kultur yang beragam dan berbeda seringkali dipandang sebagai bentuk perlawanan yang negatif, padahal menghadirkan kultur yang beragam sebenarnya hanya ingin memberikan petunjuk bahwa dalam masyarakat terdapat banyak varian kultur yang tumbuh. Oleh sebab itu, antara satu kultur dengan kultur lainnya sudah seharusnya saling menghargai, saling menghormati untuk bisa tumbuh bersama-sama.

Multikultur yang ada sebenarnya merupakan kekayaan nusantara yang sudah lahir sejak Republik ini ada, semenjak belum merdeka sudah berkembang beragam kultur, termasuk kultur beragama, kultur bekerja dan kultur berorganisasi sosial. Namun menjadi persoalan serius tentang multikulturalisme ini ketika dihubungkan dengan ketidakadilan yang menyangkut ketidakadilan ekonomi, politik, struktur sosial dan ujung dari ketidakadilan adalah ketidakadilan gender yang identik dengan kaum perempuan. Ini saja tampaknya juga tidak selesai, karena multikulturalisme yang paling rentan adalah soal multikulturalisme dalam bidang keagamaan yang

seringkali disamakan dengan sinkretisme alias percampuran antar banyak keyakinan sehingga harus dilawan. Perlawanan paling sengit datang dari kelompok dominan (mayoritas) karena yang sesungguhnya terjadi adalah adanya perebutan ruang publik untuk dapat dimasukinya sehingga terjadi kerangkeng ruang publik atas nama kultur dominan atau kultur mayoritas. Karena yang menang adalah kultur mayoritas (kultur dominan) maka kultur minoritas termasuk kultur beragam menjadi persoalan yang menjerus pada perlakuan diskriminatif dan ketidakadilan dalam masyarakat yang berbasiskan kultur dominan entah agama atau politik.

Lahirnya kultur dominan yang diskriminatif sebenarnya merupakan embrional dari munculnya kultur kekerasan. Hal ini karena kekerasan yang diskriminatif merupakan sumber awal dari seluruh kekerasan yang bisa saja berupa kekerasan simbolik, kekerasan yang tidak aktual tetapi terungkap dalam perkataan dan bentuk-bentuk simbolik seperti pembagian kerja, penempatan posisi, dan kurangnya penghargaan atas jerih payah kelompok minoritas etnis, agama maupun struktur sosial. Disinilah tugas banyak pihak untuk menciptakan kultur yang adil karena hanya inilah yang akan mendorong pada terbentuknya sebuah masyarakat yang beradab dan tidak diskriminatif berbasiskan gender.

Referensi

- Elliott, Carolyn M, (ed) *Global Empowerment of Women: Responses to Globalization and Politicized Religions*, Routledge, Madison, New York, 2008
- Noorsalim, Mashudi, Nur Khoiron, Ridwan al Makasary, (ed) *Hak Minoritas: Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa, Tifa dan The Interseksi Foundation*, Jakarta 2007
- Stevenson, Nick, *Cultural Citizenship: Cosmopolitan Question*, Open University Press, England, 2003
- Sri Roviana, Direktur Pusat Layanan Informasi Perempuan (PLIP Mitra Wacana), menyelesaikan Master dalam Bidang Sosiologi Pembangunan Universitas Gadjah Mada 2009, anggota asosiasi peneliti Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta.